

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pelayanan Publik di Polsek Pandak

Sanisah<sup>1</sup>, Melani Regita Cahyani<sup>2</sup>

Program Study Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

nisasanisa23@gmail.com

### Abstrak

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan kinerja pelayanan publik yang baik menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan instansi sektor publi, terutama pada lembaga kepolisian yang berperan menyediakan pelayanan kepada publik. Polsek Pandak sebagai unit pelaksana teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran negara serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kegiatan ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik di Polsek Pandak berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Polsek Pandak telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), menyusun laporan keuangan secara periodik, serta mengaitkan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja pelayanan publik. Selain itu, kinerja pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan didukung oleh pelaksanaan audit internal sebagai bentuk pengawasan. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik di Polsek Pandak telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: *Akuntabilitas Keuangan, Kinerja Pelayanan Publik, Akuntansi Sektor Publik, Polsek Pandak*

### Abstract

*Financial management accountability and public service performance are crucial aspects of public sector governance, particularly within police institutions as public service providers. Polsek Pandak, as a technical implementing unit of the Indonesian National Police, is responsible for managing state budgets and delivering quality public services. This study aims to describe the implementation of financial management accountability and public service performance at Polsek Pandak based on interviews with internal officers. The method used is a descriptive qualitative approach through structured interviews. The results indicate that Polsek Pandak has implemented accrual-based Government Accounting Standards, utilized the Regional Financial Management Information System (SIMDA), prepared periodic financial reports, and linked budget utilization with public service performance achievements. In addition, public service performance is measured through the Community Satisfaction Index and supported by internal audit mechanisms as a form of oversight. These findings show that financial management accountability and public service performance at Polsek Pandak have been implemented properly and contribute to the realization of good governance.*

Keywords: *Financial Accountability, Public Service Performance, Public Sector Accounting, Polsek Pandak*

## 1. PENDAHULUAN

Sektor publik memiliki peran strategis dalam upaya mengelolaan sumber daya negara agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada pencatatan transaksi, tetapi juga menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pelayanan publik. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik (Mardiasmo, 2018).

Salah satu prinsip utama dalam akuntansi sektor publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat

sebagai pemberi mandat. Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (Putri & Sari, 2021). Selain akuntabilitas, prinsip transparansi juga menjadi elemen penting, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diakses oleh publik. Transparansi pengelolaan keuangan berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah penyimpangan anggaran (Rahmawati & Nugroho, 2020).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia mengacu pada regulasi keuangan negara dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pratama & Lestari, 2019). SAP berbasis akrual menuntut pengakuan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi sehingga informasi keuangan menjadi lebih andal dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan (PP No. 71 Tahun 2010).

Selain aspek keuangan, akuntansi sektor publik juga berkaitan erat dengan pengukuran kinerja. Kinerja sektor publik diukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan pelayanan publik. Pengukuran kinerja pelayanan publik dapat dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai alat evaluasi pelayanan publik yang efektif (Widodo & Handayani, 2022). Hal ini sejalan dengan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya pengukuran kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja pelayanan publik. Kepolisian sebagai bagian dari sektor publik memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan publik. Polsek Pandak sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan tidak hanya bertanggung jawab atas aspek operasional kepolisian, tetapi juga pengelolaan anggaran negara secara akuntabel. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung terwujudnya good governance di lingkungan kepolisian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik di Polsek Pandak berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik akuntansi sektor publik pada institusi kepolisian serta menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa akuntansi sektor publik.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak internal Polsek Pandak yang memahami pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pelayanan publik. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang mencakup tugas dan fungsi Polsek, pengelolaan keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem informasi keuangan, laporan keuangan, audit, serta pengukuran kinerja pelayanan publik.

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik di Polsek Pandak. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan sektor publik berdasarkan pengalaman langsung di lapangan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Polsek Pandak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi sektor publik sesuai dengan peran kepolisian, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, pembinaan masyarakat (BINMAS), penanganan laporan masyarakat, serta respons terhadap kejadian darurat di wilayah Kecamatan Pandak.

Layanan publik utama yang diberikan oleh Polsek Pandak meliputi pelayanan laporan kehilangan barang atau dokumen, penerimaan pengaduan masyarakat, serta pelayanan administrasi kepolisian lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) saat ini telah terpusat di tingkat Polres, sehingga Polsek Pandak lebih berfokus pada pelayanan langsung yang berkaitan dengan kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Polsek Pandak telah mengacu pada regulasi keuangan negara dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Proses pencatatan transaksi keuangan dimulai dari pengumpulan bukti transaksi, verifikasi, pencatatan dalam jurnal, pembukuan ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan secara periodik.

Laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Proses perencanaan dan penyusunan anggaran di Polsek Pandak mengikuti siklus anggaran pemerintah yang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini antara lain Kepala Polsek, pejabat pengelola keuangan, serta koordinasi dengan Polres dan Polda. Selain itu, Polsek Pandak telah mengaitkan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja pelayanan publik. Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menilai aspek kecepatan, keramahan, keandalan, dan empati petugas dalam memberikan pelayanan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan melalui audit internal oleh Polres dan Polda sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi.

#### **3.2 Pembahasan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan di Polsek Pandak telah mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memungkinkan pengakuan transaksi keuangan secara lebih komprehensif, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan relevan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada publik. Penggunaan sistem SIMDA turut mendukung keteraturan proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pengaitan antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja pelayanan publik menunjukkan adanya upaya penerapan akuntabilitas kinerja. Setiap penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polsek Pandak, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (Putri & Sari, 2021).

Pengukuran kinerja pelayanan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Aspek kecepatan, keramahan, keandalan, dan empati menjadi indikator penting dalam menilai pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Temuan ini mendukung pendapat bahwa pengukuran kinerja pelayanan publik melalui IKM dapat menjadi alat evaluasi yang efektif untuk mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan audit internal oleh Polres dan Polda berperan sebagai mekanisme pengawasan dalam pengelolaan keuangan Polsek Pandak. Audit internal tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik di Polsek Pandak telah berjalan sejalan dengan prinsip akuntansi sektor publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 1. Piala Penghargaan Polsek Pandak



Gambar 2. Wawancara Polsek Pandak

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa Polsek Pandak telah menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik secara cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, penggunaan sistem informasi keuangan SIMDA, penyusunan laporan keuangan secara periodik, serta keterkaitan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja pelayanan publik. Selain itu, pengukuran kinerja melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan pelaksanaan audit internal menunjukkan adanya upaya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Ke depannya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan konsistensi pengawasan tetap diperlukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di lingkungan kepolisian.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Polsek Pandak yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesediaan waktu dan informasi sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Program Studi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan akuntansi sektor publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pratama, A., & Lestari, D. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 11(2), 85–98.
- Putri, R. A., & Sari, M. P. (2021). Akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(1), 45–56.
- Rahmawati, N., & Nugroho, Y. A. (2020). Transparansi pengelolaan keuangan sektor publik dan pengawasan anggaran. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(2), 60–72.
- Widodo, S., & Handayani, T. (2022). Pengukuran kinerja pelayanan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33–44.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Kementerian PANRB. (2017). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat*.